



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADNAN NOTA**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **923061**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.087.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/162 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 337.000.000
3. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Bangunan Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
9. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **120.500.000**



1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOBIL, HONDA BRILIO - Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.550.540
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.260.050.540
III. HUTANG	Rp.	112.144.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.147.906.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.